

KOORDINASI ELITE DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Desa Pampalu Ecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)

*Oklian Madila¹
Welly Waworundeng²
Alfon Kimbal³*

Koordinasi antara elite desa dalam pembangunan sangatlah penting. Melalui pembangunan yang dilaksanakan di desa dapat dilihat sejauh mana keterlibatan dan koordinasi dari elite kekuasaan dan elite non kekuasaan, dalam menunjang sukses dan lancarnya pembangunan di desa Pampalu. Perlunya keterlibatan dari elite desa dalam pembangunan terutama elite non kekuasaan, Agar keputusan dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya berada di satu pihak tetapi hasil keputusan secara bersama. Karena tujuan dari koordinasi untuk menyelaskan, menyerasikan pemikiran, menjaga iklim responsive dalam organisasi dan juga untuk mencegah konflik. Koordinasi adalah untuk bekerja bersama-sama atau menyepakati bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan jenis data primer berupa wawancara dan observasi di desa Pampalu kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Dan pengumpulan data dengan jenis data sekunder berupa dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi elite desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Pampalu kecamatan beo selatan kabupaten kepulauan talaud masih belum baik hal ini dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan antara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan jarang dilakukan dan masih kurangnya pakar-pakar pemikir atau profesor yang mengerti dengan baik tentang pembangunan dan pemberdayaan serta penggunaan dana desa.

Kata Kunci: Koordinasi, Elit, Pembangunan Desa

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 bab IX dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan. Program pembangunan Desa Pampalu dimulai dari perencanaan, proses perencanaan pembangunan di desa yang biasa disebut Musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa). Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam perencanaan pemerintah desa (UU no 6 tahun 2014 pasal 54 ayat 1). Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa dan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak mendapat informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa (pasal 81 dan 82). Berbicara tentang elite pastinya itu membahas tentang orang-orang yang berpengaruh di desa. Selain kepala desa orang yang paling berpengaruh di desa Pampalu adalah tokoh adat (Ratu wanua/ sebutan untuk ketua adat), bahkan kepala desa juga dalam mengambil sebuah keputusan

selalu meminta pertimbangan dari ketua adat sebagai yang di tuakan dan dihormati di desa pampalu. Kepala desa dan ketua adat yang memiliki pengaruh yang lebih besar pada masyarakat adalah ketua adat, karena ketua adat yang dimintai nasehat oleh pembuat keputusan dan kepentingan dan pendapatnya diperhitungkan oleh pembuat keputusan itu yaitu pemerintah desa. Dalam sebuah organisasi selalu dijumpai satu kelompok individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, ia tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang ia atau mereka mainkan. Oeh karena itu keterlibatan elite yang ada di desa sangatlah berpengaruh pada proses pembangunan yang ada di desa tersebut. Seperti halnya desa Pampalu yang menjadi lokasi penelitian dalam 3 tahun terakhir suda melaksanakan beberapa pembangun yang berupa pembngunan fisik yaitu infrastruktur desa dan pembangunan manusia yaitu pemberdayaan masyarakatnya. Dalam proses penyusunan semua program pembangunan di desa dari yahap perencanaan sampai dengan pengawasan sudah pasti ada keterlibata elite desa, entah elite kekuasaan mupun elite non kekuasaan sudah pasti semua teribat dalam proses tersebut. Karena koordinasi yang baik akan menciptakan suatu hasil yang baik juga. Yang terjadi di desa Pampalu dalam proses penyusunan program semua komponen elite kepupasaan dan elite non kekuasaan ikut hadir dalam musyawara. Namun dalam pengambilan keputusan ada kalanya saran dan masukan dari elite non kekuasaan tidak di hiraukan. Karena elite non kekuasaan juga adalah anggota masyarakat maka masukan dari elite non kekuasaan juga adalah suara

rakyat yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mengingat pentingnya peran partisipasi dan transparansi dalam pembangunan maka seharusnya dalam musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan Desa) elite kekuasaan (governing elite) berkoordinasi dengan elite nonkekuasaan, dan di Desa Pampalu tidak ada masyarakat yang bekerja di kantor kecamatan ataupun kantor daerah. Ada yang bekerja di kantor daerah namun hanya sebagai pegawai honorer bukan Pegawai Negeri Sipil dan juga tidak ahli/pakar pemerintahan dan politik yang berstatus professor. Masih kurangnya pakar dalam membantu merumuskan dan mengawasi pembangunan di desa Pampalu maka (nongoverning elite) dengan baik agar hasil yang dicapai juga sesuai harapan masyarakat.

Hal ini dikarenakan elite nonkekuasaan yang sangat banyak berpartisipasi dan dibutuhkan dalam proses pembangunan baik dalam pemberian input (ide, biaya, tenaga), pelaksana kegiatan, pemantauan dan pengawasan serta pemanfaatan hasil pembangunan. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, yang terjadi di Desa Pampalu adalah sebaliknya elite nonkekuasaan tidak di libatkan. Hal inilah yang memicu elite nonkekuasaan tidak lagi berpartisipasi dalam pembangunan di Desa, mereka tidak dilibatkan secara langsung untuk menjadi bagian dari pembangunan yang sedang berlangsung di desa oleh karena itu elite nonkekuasaan mengatakan bahwa mereka merasa tidak terlalu di butuhkan dalam pembangunan.

Secara umum terlihat bahwa koordinasi elite desa dalam pelaksanaan

pembangunan belum terwujud secara menyeluruh. Sesuai pengamatan peneliti di lokasi penelitian masih di temui adanya keluhan masyarakat bahwa pembangunan di desa Pampalu masih belum memenuhi harapan masyarakat desa di tandai dengan masih kurangnya keterlibatan elite nonkekuasaan (nongoverning elite), contohnya, pembangunan fisik yang telah di laksanakan di Desa Pampalu seperti pembangunan jalan produksi, pagar desa, drainase (selokan dan bendungan untuk air desa) itu tidak melibatkan pengusaha (yang punya toko) di desa Pampalu untuk menjadi penyedia bahan bangunan untuk kegiatan fisik di atas. Elite kekuasaan lebih memilih bekerja sama dengan pengusaha yang ada di desa tetangga untuk menjadi penyedia bahan bangunan untuk pembangunan fisik di desa. Jika disadari elite nonkekuasaan sangat penting dalam pembangunan seperti halnya pengusaha dan orang kaya yang ada di desa pampalu mereka bisa di andalkan untuk menjadi penyumbang dana, penyedia bahan bangunan, material, alat transportasi material, untuk pembangunan fisik di desa. Elite kekuasaan dapat bekerja sama dengan pengusaha dan orang kaya di desa untuk mendanai dan memfasilitasi pembangunan awal meskipun dana untuk pembangunan belum bisa dibayarkan kepada mereka karena masih menunggu Dana Desa yang akan dicairkan oleh pemerintah (menurut sepri, warga desa Pampalu), Itulah keunggulan jika elite kekuasaan berkoordinasi dengan elite nonkekuasaan dengan baik. Kurangnya koordinasi dari elite yang ada di desa mengakibatkan pelaksanaan pembangunan di desa Pampalu belum terlaksana dengan baik, dengan tidak

dilibatkannya elite nonkekuasaan secara langsung dalam pembangunan desa maka hal ini akan mengakibatkan adanya kerenggangan koordinasi antara elit desa. Dan mengapa elite nonkekuasaan tidak dilibatkan dalam pembangunan, hanya mereka elite kekuasaan yang terlibat dalam pembangunan.

Hubungan yang terjadi antara elite kekuasaan dan elite nonkekuasaan tidak terjalin dengan baik dan menimbulkan koordinasi antara elit kekuasaan dan elite nonkekuasaan dalam melaksanakan tugasnya mensukseskan program pembangunan di Desa Pampalu, kaum elite kekuasaan ingin menunjukkan bahwa siapa yang paling berperan dalam pembangunan itu sehingga mereka mengabaikan kaum elit nonkekuasaan. Mengapa tidak dilibatkan secara langsung dalam menangani pembangunan di desa dan tidak dibiarkan berpartisipasi untuk membantu melancarkan dan mensukseskan pembangunan yang ada di desa, jika pada dasarnya merekalah orang-orang yang dibutuhkan di desa untuk membantu tumbuh kembang dari desa tersebut, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa dan pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat.

Menyikapi hal tersebut di harapkan koordinasi yang terjalin di antara elite kekuasaan dan elite nonkekuasaan berlangsung dengan baik. Relasi sosial dalam bentuk koordinasi antar elite kekuasaan dan elite nonkekuasaan seharusnya memberikan jalan untuk tercapainya sebuah kesepakatan demi terciptanya suatu koordinasi yang baik untuk membangun desa dan mensejahterakan masyarakat yang ada di desa, sebagaimana yang di ketahui koordinasi adalah mengimbangi dan

menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85).

Tinjauan Pustaka

Konsep Koordinasi Ndraha (2015:290) secara etimologi koordinasi berasal dari kata coordination, “co” berarti bersama dan “ordinare” berarti memerintah, jadi coordination berarti memerintah bersama (to regulate). Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga disuatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain, sementara disisi yang lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain Ndraha dalam kymbernologi (2011:290) secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul Kybernologi (2011:291): Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa

sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain. Ndaraha (2003:292) mengatakan koordinasi internal adalah koordinasi antar pemerintah dengan yang diperintah. Koordinasi disebut juga koordinasi tripartite antar plat merah (pemerintah), plat kuning (swasta), dan plat hitam (masyarakat). Yang di perintah disini bukanlah bawahan pemerintah, tetapi komponen, ibarat produser atau seler dalam hubungannya dengan pelanggan atau konsumen. Pada suatu saat pemerintah berperan sebagai produser yang diperintah konsumen, dan disaat lain sebaliknya yang diperintah produser dan yang memerintah consumer.

Menurut Ndraha (Kymbernologi 2015:295) pengertian tentang koordinasi di atas menyiratkan bahwa koordinasi bertujuan untuk:

- a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyelesaian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Bentuk koordinasi menurut Ndraha (2015:295), melalui sudut manajemen koordinasi diidentifikasi melalui ada tidaknya dan jenis serta sifat hubungan antar unit kerja dalam lingkungan pemerintahan. Berdasarkan sudut pandang ini, diidentifikasi beberapa bentuk koordinasi seperti:

1. Koordinasi waktu

Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak urutannya. Koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, kausal, dan sebangsanya;

2. Koordinasi ruang

Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah. Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja;

3. Koordinasi interinstitusional

Koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serbaguna atau produk bersama tertentu;

4. Koordinasi fungsional

Koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional;

5. Koordinasi struktural

Koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela;

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah sebagai berikut :

a. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota koordinasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri agar anggota

atau satuan organisasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi.

c. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan.

d. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para atasan untuk berkomunikasi dengan bawahan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.

Metode Penelitian

Moleong (2007:6) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran,

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Disamping itu, Moleong (2007:7) pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang di hadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung

Moleong (2007:97) Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.

Konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah "Koordinasi elite desa dalam pelaksanaan pembangunan desa" yang di defenisikan sebagai penyepakatan bersama secara mengikat berbagai unsur yang berbeda dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi, mencegah konflik, menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsive-antisipatif dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di desa Pampalu, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud. Informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Menurut (Moleong,2005:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu koordinasi elite desa dalam pelaksanaan pembangunan desa maka informan penelitian (sumber data) dalam

penelitian ini diambil dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat yaitu :

- 1.Kepala Desa (Kapitalau)
- 2.Kaur keuangan
- 3.Ketua BPD
- 4.Tokoh adat 1 orang
- 5.Tokoh agama 1 orang
- 6.Pengusaha 1 orang
- 7.Tokoh pendidikan (Guru)
- 8.Tokoh Pemuda
- 9.Masyarakat 1 orang

Hasil Penelitian

1.Koordinasi Untuk Menciptakan Dan Memelihara Efektifitas Organisasi Pelaksanaan pembangunan adalah merupakan langkah untuk mencapai masyarakat sejahtera salah satunya sejahtera dari segi ekonomi, agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan maka salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah koordinasi dari pemerintah desa dalam menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Koordinasi antara elite kekuasaan (pemerintah desa) dan elite non kekuasaan (tokoh masyarakat) harus dibangun dengan baik agar supaya hasil dari pembangunan di desa memuaskan masyarakat.

“Untuk mewujudkan koordinasi elite desa yang baik dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Pampalu, dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam membahas program pelaksanaan pembangunan di desa Pampalu. Kepala desa selaku pimpinan pemerintah yang ada di desa mengkoordinasikan antara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan dalam melaksanakan pertemuan dalam rangka membahas perencanaan pembangunan desa. Menurut pengalaman kami sejauh ini koordinasi

antara elite desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Pampalu berjalan baik karena ada kerjasama antara semua unsur terkait. Selalu melibatkan elite non kekuasaan dalam kegiatan pembangunan di desa. Peran seorang kepala desa dapat dilihat dari kinerja serta koordinasi yang ia bangun dengan organisasi yang ada di desa tersebut, karena ketika koordinasi terjalin dengan baik maka semua apa yang ingin dicapai untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat di desa itu akan terlaksana dengan baik. Partisipasi tokoh masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat yang di perankan oleh elite non kekuasaan. Oleh karena itu elite non kekuasaan harus dilibatkan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, karena elite non kekuasaan merupakan utusan masyarakat untuk bekerja bersama pemerintah desa (governing elite) serta mengawasi bersama dalam pelaksanaan pembangunan. Koordinasi elite yang ada di desa Pampalu berjalan dengan baik, elite non kekuasaan dilibatkan dalam musyawarah desa. Elite kekuasaan (governing elite) membangun hubungan yang baik dengan elite non kekuasaan (nongoverning elite) dengan melibatkan elite non kekuasaan untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rancana-rencana kegiatan yang akan di laksanakan, manfaat yang akan di peroleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Dengan melihat dampak penting dan positive dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat dan tokoh masyarakat (nongoverning elite) yang optimal dalam perencanaan pembangunan di

desa maka koordinasi antara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan akan semakin kuat dan semakin baik. Adanya rasa saling menghargai dan membutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan pembangunan di desa itu akan menciptakan dan memelihara koordinasi yang baik dalam suatu organisasi dan tidak mudah di pecah belahkan oleh orang-orang luar . Untuk mewujudkan koordinasi yang efektif antara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan seharusnya saling paham dan seia sekata dalam mengambil suatu keputusan dalam perencanaan pembangunan agar mendapat keputusan dan hasil musyawarah yang baik. Hal ini disampaikan oleh masyarakat yang ada di desa Pampalu yaitu :

“Koordinasi antara elite desa dalam pengambilan keputusan atas apa yang menjadi usulan dalam musyawarah perencanaan pembangunan antara elite kekuasaan dan elite nonkekuasaan adakalanya tidak sepemikiran dan tidak sejalan. Oleh karena itu perlunya pemikiran dan tujuan yang sama antar elite yang ada di desa agar supaya terjalin koordinasi yang baik, melalui semua perbedaan pandangan dan tanggapan terhadap usulan-usulan yang disampaikan maka akan terbangun sebuah koordinasi yang baik. Koordinasi untuk lebih memantapkan pemikiran para elite desa sehingga melalui koordinasi yang belajar dari perbedaan pandangan sehingga terciptalah pembangunan yang baik di desa Pampalu”.

Dalam pengambilan keputusan pada musyawarah desa dalam rangka membahas program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa harusnya lebih demokratis dan terbuka, karena jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya akan timbul kecurigaan akan

adanya kepentingan sepihak dari pengusul program tersebut dan musyawarah dilaksanakan untuk mencapai mufakat. Partisipasi masyarakat dan tokoh masyarakat/elite non kekuasaan dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini elite desa harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dalam memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa untuk dapat menyampaikan dan menjelaskan dengan baik tentang maksud dan tujuan dari program yang akan direncanakan tersebut agar elite non kekuasaan dapat memahami dan mengerti dengan baik. Hal ini ditujukan untuk menghindari perbedaan tanggapan dan adanya pertentangan pendapat dalam mengajukan dan memutuskan program yang ada di desa.

Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi. “Proses pelibatan elite non kekuasaan (nongoverning elite) itu dilaksanakan dalam musyawarah bersama masyarakat. Namun, koordinasi yang terjalin antara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan tidak berjalan dengan baik atau bisa dikatakan sering ada, sering juga tidak ada koordinasi. Kurangnya pertemuan antara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan dalam membahas pembangunan yang ada di desa, hal inilah yang menyebabkan koordinasi antar elite di desa Pampalu tidak

berjalan dengan baik. Namun tetap saja ada koordinasi antara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan, melihat dari semua pembangunan yang sudah ada di desa Pampalu".(Informan : JM,Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa). Koordinasi pemerintah merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan yang harus ditujukan kearah tujuan yang hendak dicapai yaitu yang telah di tetapkan pada musyawarah desa guna menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pada koordinasi sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan. Pentingnya koordinasi antara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan adalah untuk mencegah supaya tidak ada masalah yang timbul, ataupun ketika ada masalah yang timbul elite kekuasaan dan elite non kekuasaan mampu mengatasi masalah tersebut bersama-sama sehingga pembangunan di desa tetap berjalan dengan baik sesuai tujuan yang ingin dicapai. Mengapa koordinasi antara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan harus sering dilaksanakan yaitu tujuannya untuk membangun suatu hubungan yang baik antara elite yang ada di desa supaya tidak timbul anggapan bahwa elite kekuasaan tidak menganggap dan tidak mau melibatkan elite non kekuasaan dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Koordinasi harus sering dilaksanakan dan itu merupakan suatu yang harus agar semua yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Koordinasi Mencegah Konflik

Koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh banyak pihak dari suatu organisasi yang sederajat untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu

dengan pihak yang lain. Koordinasi merupakan satu hal yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacuan, percecokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di desa Pampalu. Dari wawancara dengan kapitalau desa Pampalu di ungkapkan bahwa:

"Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Pampalu itu melibatkan seluruh anggota masyarakat termasuk didalamnya elite kekuasaan dan elite non kekuasaan, hal ini dilakukan guna menjaga agar supaya tidak terjadi konflik/masalah antar elit yang ada di desa. Koordinasi terhadap pelaksanaan program pembangunan desa di desa Pampalu dilakukan dalam bentuk mengadakan pertemuan antara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan untuk menyampaikan program tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya akan dibahas dan didiskusikan bersama mengenai pengaturan waktu dan jadwal pelaksanaan, dan juga kendala/hambatan dalam pelaksanaan dan upaya/tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasinya.

Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggungjawab pelaksanaan pembangunan untuk menyusun sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan yang ada di desa, untuk itu perlunya penjelasan yang lebih lanjut dari elite yang ada di desa agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam penyusunan program. Koordinasi yang baik antara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan akan menciptakan suatu hubungan yang baik dalam menjaga efisiensi, mencegah konflik di dalam organisasi. Koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan yang akan dicapai, untuk menghindari segala kekacauan dalam pelaksanaan pembangunan. Koordinasi bertujuan agar elite kekuasaan dan elite non kekuasaan dapat bekerjasama dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Koordinasi untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi, untuk itu elite kekuasaan dalam pelaksanaan pembangunan di desa dalam pelaksanaan penyusunan program pembangunan dalam musrembang desa melibatkan seluruh komponen yang ada yaitu elite kekuasaan, elite non kekuasaan dan masyarakat. Penyusunan program pembangunan yang partisipatif akan menghasilkan dampak yang positif. Dalam pengambilan keputusan pada saat musyawara desa sering kali terjadi perbedaan pendapat dan koordinasi antara elite desa sering dilaksanakan sering tidak, dari kedua hal tersebut bisa menimbulkan keretakan organisasi. Untuk itu dalam menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi antara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan sering dilakukan koordinasi karena ketika ada perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan dapat terselesaikan dengan baik tanpa merusak hubungan dalam organisasi di desa. 2. Koordinasi Mencegah konflik, Koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan berbagai pihak dari suatu organisasi. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa pampalu sudah

pasti tidak lepas dari masalah, mulai dari meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bergotong royong dalam pembangunan, meyakinkan masyarakat untuk merelakan sebagian kecil tanahnya untuk menjadi lokasi pembanguna untuk kepentingan masyarakat, serta belum adanya pengusaha besar yang ada di desa Pampalu sehingga masih mencari pemasok bahan untuk bangunan fisik dan pemberdayaan di desa Pampalu. Dari masalah yang ada di atas fungsi koordinasi adalah untuk mencegah semua masalah itu agar tidak menjadi masalah tetapi mencari solusi untuk masalah tersebut dengan cara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan saling berkoordinasi dalam bertukar pikiran, mencari solusi dari masalah tersebut sehingga semua program di desa Sampai saat ini terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

3. Koordinasi menciptakan dan memelihara iklim responsive, dalam sautu organisasi keadaan tidak selalu tenang, tidak selalu sepeti itu adakalanya keadaan berubah dan tak terduga. Oleh karena itu selalu dibutuhkan koordinasi untuk mengatasi semua hal tersebut. Seperti masyarakat yang tidak ingin berpartisipasi dalam pembangunan, elite kekuasaan dan elite non kekuasaan harus saling koordinasi dalam menangani masyarakat yang seperti ini agar proses penyusunan pembangunan dalam musrembang terlaksana dengan baik. Koordinasi antara elite desa harus dijaga agar tetap baik, karena ketika keadaan di lapangan tak sesuai harapan elite kekuasaan dan elite non kekuasaan tetap bisa berkoordinasi dan tidak gampang dipecah belahkan oleh masalah yang di desa.

koordinasi elite desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Pampalu, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud sudah cukup baik dilihat dari semua program pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa. Namun koordinasi antara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan harus lebih diperbaiki dan ditingkatkan, mengingat bahwa koordinasi itu sangat penting dalam menciptakan dan memelihara serta mencegah terjadinya konflik dalam suatu organisasi yang ada di masyarakat.

Koordinasi elite desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Pampalu masih memerlukan upaya sinkronisasi, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Pelibatan elite non kekuasaan dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Pampalu belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, oleh karena itu koordinasi yang baik antara elite kekuasaan dan elite non kekuasaan sangat dibutuhkan untuk proses kedepannya yang lebih baik agar pelaksanaan pembangunan desa di desa Pampalu berjalan dengan baik, aman, tertib, lancar dan efektif.

Saran

Koordinasi elite desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Pampalu sudah dilakukan dengan cukup baik, namun tetap harus ditingkatkan dan diperbaiki lagi kualitasnya baik pada perencanaan, pelaksanaan. Untuk itu perlu di kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan koordinasi yang baik antara elite yang ada di desa Pampalu, dalam proses perencanaan pembangunan harus dibangun koordinasi yang lebih baik. Elite desa harus lebih sering berkoordinasi untuk membahas rencana program

pembangunan yang akan dilaksanakan di desa.

2. Dalam mencari solusi untuk masalah yang terjadi di lapangan elite kekuasaan dan elite non kekuasaan harus sering berkoordinasi dalam mencari solusi.

3. Lebih di tingkatkan lagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan di desa Pampalu dan juga harus ada pakar atau orang berpendidikan di bidang pemerintahan dan politik yang memahami tentang pembangunan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwas, Oos M. (2013). "Pemberdayaan Masyarakat di Era Global". Bandung; Alfabeta,
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chalik, Abdul . 2017. Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Creswell, J. W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2006). Organisasi dan Motivasi – Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Cetakan 9. PT. Bumi Aksara.
- Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta : PT. Gelora Akasara Pratama.
- Jurdi, Syarifuddin, 2010. Islamisasi Or Politisasi Islam Di Bima, Final Report Penelitian Kompetitif Individual: Depag RI
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001. Pembangunan Untuk Rakyat:

Memadukan Pertumbuhan Dan
Pemerataan, Jakarta : Pustaka
CIDESINDO.
Moelong Lexi J, 2007. Metode
Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja
Rosdakarya,
Moelong Lexi J, 2005. metodologi
penelitian kualitatif, Bandung: Remaja
Rosdakarya
Nas, Jayadi (2007) Konflik Elite di
Sulawesi Selatan: Analisis
Pemerintahan dan Politik Lokal.
Makassar: Lephass & Yayasan Massaile.
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi
(Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2.
Rineka Cipta. Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu, 2011. Kybernology
(Ilmu Pemerintahan Baru) 1, Jakarta:
Rineka Cipta.
Ndraha, Taliziduhu, 2015. Kybernology
(Ilmu Pemerintahan Baru) 1, Jakarta:
Rineka Cipta
Patilima, Hamid. 2007. Metode
Penelitian Kualitatif. Jakarta : Alfabeta.
Siagian, Sondang P. 2008. Adminitrasi
Pembangunan. Jakarta : PT. Bumi
Aksara.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Bandung:
Alfabeta.
Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007.
Pembangunan Dilema dan Tantangan.
Yogyakarta : Pustaka pelajar.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa
Amin, Khairul , S.Sos. 2017. Elit Dan
Kekuasaan Pada Masyarakat Desa Studi
Relasi Antara Pemerintah dan
Masyarakat di Desa Rias Kecamatan
Toboali Kabupaten Bangka Selatan
Provinsi Kep. Bangka Belitung Jurnal
Sosiologi, USK Volume 11, Nomor 2,
halaman 168.
Ishak, Fistarisma. 2016. Analisis
Partisipasi Masyarakat Dalam

Menunjang Pembangunan Desa Di
Kecamatan Tongauna Kabupaten
Konawe.
Isye, Regina, Altje, Manoppo. 2017.
Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa
Dalam Pelaksanaan Pembangunan
(Studi di Desa Buise Kecamatan Siau
Timur Kabupaten Sitaro), Jurnal
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam
Ratulangi Volome 2 No. 2
Sharon, Sumenge Ariel. 2013” Analisis
Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan
Anggaran Belanja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Minahasa Selatan”. Jurnal Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas
Sam Ratulangi Manado/ Vol.1. No.3,
Hal.75
Sudirman, 2017. Partisipasi Tokoh
Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
(Studi Di Desa Unteboang Kecamatan
Sosorgadong Kabupaten Tapanuli
Tengah Propinsi Sumatera Utara).